

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis sehubungan dengan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sedaratan Timor dalam bab sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat saya rumuskan adalah sebagai berikut:

1. Analisis perbandingan kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Sedaratan Timor Tahun Anggaran 2013-2017 untuk setiap rasio yang dianalisis:

a. Kinerja Keuangan Pendapatan Daerah

1) Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

Dalam perspektif rasio ini, secara rata-rata tingkat perolehan Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal untuk semua Kabupaten/Kota sedaratan Timor adalah sebesar 7,50%. Sementara kinerja secara individual untuk setiap Kabupaten/Kota dengan menggunakan rasio ini, Kota Kupang memiliki Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal terbaik dibandingkan dengan Kabupaten lainnya sedangkan Kabupaten Timor Tengah Utara memperoleh Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal terburuk.

2) Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Dalam perspektif rasio ini, secara rata-rata tingkat perolehan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah untuk semua Kabupaten/Kota sedaratan Timor adalah sebesar 9,66%. Sementara kinerja secara

individual untuk setiap Kabupaten/Kota dengan menggunakan rasio ini, Kota Kupang memiliki Rasio Kemandirian Keuangan Daerah terbaik dibandingkan dengan Kabupaten lainnya sedangkan Kabupaten Timor Tengah Utara memperoleh Rasio Kemandirian Keuangan Daerah terburuk.

3) Rasio Efektivitas PAD

Dalam perspektif rasio ini, secara rata-rata tingkat perolehan Rasio Efektivitas PAD untuk semua Kabupaten/Kota se-daratan Timor adalah sebesar 89,23%. Sementara kinerja secara individual untuk setiap Kabupaten/Kota dengan menggunakan rasio ini, Kota Kupang memiliki Rasio Efektivitas PAD terbaik dibandingkan dengan Kabupaten lainnya sedangkan Kabupaten Kupang memperoleh Rasio Efektivitas PAD terburuk.

b. Kinerja Keuangan Belanja Daerah

1) Rasio Efisiensi Belanja Daerah

Dalam perspektif rasio ini, secara rata-rata tingkat perolehan Rasio Efisiensi Belanja Daerah untuk semua Kabupaten/Kota se-daratan Timor adalah sebesar 84,23%. Sementara kinerja secara individual untuk setiap Kabupaten/Kota dengan menggunakan rasio ini, Kabupaten Timor Tengah Selatan memiliki Rasio Efisiensi Belanja Daerah terbaik dibandingkan dengan Kabupaten lainnya sedangkan Kabupaten Belu memperoleh Rasio Efisiensi Belanja Daerah terburuk.

2) Rasio Keserasian Belanja Daerah

Dalam perspektif rasio ini, secara rata-rata tingkat perolehan Rasio Keserasian Belanja Daerah untuk semua Kabupaten/Kota se-daratan Timor jika dilihat dari Rasio Belanja Operasi adalah sebesar 83,87% sedangkan Rasio Belanja Modal sebesar 18,21%. Sementara kinerja secara individual untuk setiap Kabupaten/Kota dengan menggunakan rasio ini, Kabupaten Belu memiliki Rasio Keserasian Belanja Daerah terbaik dibandingkan dengan Kabupaten lainnya sedangkan Kabupaten Timor Tengah Selatan memperoleh Rasio Keserasian Belanja Daerah terburuk.

2. Tren kinerja keuangan Kabupaten/Kota se-daratan Timor Tahun Anggaran 2013 – 2017.

a. Kinerja Keuangan Pendapatan Daerah

1) Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

Berdasarkan analisis tren untuk kinerja yang diukur berbasis pada rasio ini selama Tahun Anggaran 2013 – 2017 memperlihatkan bahwa Kota Kupang merupakan daerah yang memiliki tren kinerja derajat desentralisasi fiskal terbaik. Sedangkan tren kinerja derajat desentralisasi fiskal terburuk diperoleh oleh Kabupaten Belu.

2) Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Berdasarkan analisis tren untuk kinerja yang diukur berbasis pada rasio ini selama Tahun Anggaran 2013 – 2017 memperlihatkan bahwa Kota Kupang merupakan daerah yang memiliki tren kinerja

kemandirian keuangan daerah terbaik. Sedangkan tren kinerja kemandirian keuangan daerah terburuk diperoleh oleh Kabupaten Belu.

3) Rasio Efektivitas PAD

Berdasarkan analisis tren untuk kinerja yang diukur berbasis pada rasio ini selama Tahun Anggaran 2013 – 2017 memperlihatkan bahwa Kota Kupang merupakan daerah yang memiliki tren kinerja tingkat efektivitas PAD terbaik. Sedangkan tren kinerja tingkat efektivitas PAD terburuk diperoleh oleh Kabupaten Timor Tengah Selatan.

b. Kinerja Keuangan Belanja Daerah

1) Rasio Efisiensi Belanja Daerah

Berdasarkan analisis tren untuk kinerja yang diukur berbasis pada rasio ini selama Tahun Anggaran 2013 – 2017 memperlihatkan bahwa Kabupaten Timor Tengah Selatan merupakan daerah yang memiliki tren kinerja efisiensi belanja daerah terbaik. Sedangkan tren kinerja efisiensi belanja daerah terburuk diperoleh oleh Kabupaten Belu.

2) Rasio Keserasian Belanja Daerah

Berdasarkan analisis tren untuk kinerja yang diukur berbasis pada rasio ini selama Tahun Anggaran 2013 – 2017 memperlihatkan bahwa Kota Kupang merupakan daerah yang memiliki tren kinerja keserasian belanja daerah terbaik. Sedangkan tren kinerja keserasian

belanja daerahterburuk diperoleh oleh Kabupaten Timor Tengah Selatan.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil analisis maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Untuk Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se-daratan Timor :
 - a. Kinerja Keuangan Pendapatan Daerah

- 1) Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

Berdasarkan skala interval Derajat Desentralisasi, rata-rata Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal Kabupaten/Kota se-daratan Timor dikategorikan memperoleh kemampuan daerah dengan predikat sangat kurang karena skala interval derajat desentralisasi yang diperoleh diantara 00,00%-10,00%. Sedangkan hanya Kota Kupang yang memiliki kemampuan daerah dengan predikat kurang dengan skala interval derajat desentralisasi sebesar 10,01%-20,00%. Hal ini menunjukkan bahwa ,penyelenggaraan desentralisasi fiskal pemerintah daerah Kabupaten/Kota se-daratan Timor dapat dikatakan belum maksimal. Oleh karena itu setiap pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerahnya. Peningkatan PAD dapat dilakukan dengan cara mengembangkan potensi-potensi yang telah ada dan menggali potensi-potensi baru atau memperluas objek-objek yang dapat dijadikan sebagai sumber PAD daerahnya.

2) Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Berdasarkan Presentase Kemandirian Keuangan Daerah, Rata-rata Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten/Kota se-daratan Timor dikategorikan memperoleh kemampuan daerah dengan predikat sangat rendah karena presentase kemandirian keuangan yang diperoleh antara 0% - 25%. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah Kabupaten/Kota se-daratan Timor dapat dikatakan belum mandiri dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahannya sehingga masih adanya ketergantungan yang besar terhadap bandutan dana perimbangan dari pemerintah pusat. Oleh karena itu setiap pemerintah daerah diharapkan dapat mengoptimalkan penerimaan daerah dari potensi yang telah ada. Peningkatan PAD bisa dilakukan dengan cara melaksanakan secara optimal pemungutan pajak dan retribusi daerah serta melakukan pengawasan dan pengendalian secara sistematis dan berkelanjutan untuk mengantisipasi terjadinya penyimpangan dalam pemungutan PAD.

3) Rasio Efektivitas PAD

Berdasarkan Presentase Efektivitas PAD, Rata-rata Rasio Efektivitas PAD Kabupaten/Kota se-daratan Timor dikategorikan tidak efektif karena presentase efektivitas PAD yang diperoleh kurang dari 100%. Hal ini menunjukkan bahwa harapan pemerintah daerah terhadap PAD yang dihasilkan sangat melampaui batas kemampuan PAD yang ada sehingga besarnya PAD yang dianggarkan terlalu besar sedangkan

realisasi PAD yang diterima kecil serta belum adanya usaha yang optimal dari pemerintah daerah dalam menggali dan mengembangkan potensi PAD yang ada. Oleh karena itu pemerintah diharapkan agar mengevaluasi kembali potensi-potensi daerah yang dapat dijadikan sumber PAD sebelum menetapkan dalam anggaran tahun berjalan.

b. Kinerja Keuangan Belanja Daerah

1) Rasio Efisiensi Belanja Daerah

Berdasarkan Presentase Efisiensi Belanja Daerah, Rata-rata Rasio Efisiensi Belanja Daerah Kabupaten/Kota se-daratan Timor dikategorikan efisien karena presentase efisiensi belanja daerah yang diperoleh kurang dari 100%. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah Kabupaten/Kota se-daratan Timor sudah efisien dalam merealisasikan anggaran belanja yang telah ditetapkan sehingga realisasi belanja tidak melebihi anggaran yang ada. Akan tetapi, presentase yang diperoleh dapat dikatakancukup efisien karena presentasinya masih diantara 80%-90%. Oleh karena itu pemerintah daerah Kabupaten/Kota se-daratan Timor Pemerintah daerah diharapkan agar lebih menghemat dalam menggunakan anggaran belanja yang ada sehingga tidak terjadi pemborosan atau ketidakefisienan dalam penggunaan anggarannya. Peningkatan efisiensi belanja dapat dilakukan dengan cara mengevaluasi pengeluaran belanja terhadap program-program pemerintah yang dapat memberikan manfaat dan dianggap prioritas sehingga

berdampak besar bagi kesejahteraan masyarakat. Salah satu cara yang dilakukan yaitu dengan memotong anggaran perjalanan dinas dan kegiatan-kegiatan seminar karena kegiatan semacam ini tidak terlalu membawa dampak yang besar terhadap masyarakat sehingga perlu dikurangi.

2) Rasio Keserasian Belanja Daerah

Berdasarkan perhitungan dan analisis, Belanja Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se-daratan Timor lebih didominasi untuk Belanja Operasi dibandingkan untuk Belanja Modal. Oleh karena itu sebagai daerah di negara berkembang, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se-daratan Timor diharapkan agar lebih meningkatkan Belanja Modal sesuai kebutuhan pembangunan daerahnya masing-masing. Hal ini dapat dilakukan dengan cara mengurugi belanja pegawai pemerintah yang relatif besar dalam porsi belanja daerah untuk meningkatkan belanja publik yang langsung dinikmati oleh masyarakat.

2. Untuk peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian sama diharapkan untuk lebih mendalam mengenai kinerja keuangan pada pemerintah daerah dengan menggunakan lebih banyak rasio lagi sehingga hasil penelitiannya bisa lebih andal dan akurat daripada penelitian oleh penulis ini. Selain itu juga penelitian ini hanya dilakukan pada lima Kabupaten/Kota se-daratan Timor saja. Diharapkan peneliti selanjutnya melakukan di lingkup yang lebih luas dari penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

Adhiantoko,Hony.2013. *Analisis Kinerja Kruangan Pemerintah Kabupaten Blora Tahun 2007-2011* .Yogyakarta :Skripsi Kearsipan Fakultas Ekonomi, Universitas Yogyakarta

Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia. 2017. Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II.(online)
(<http://www.bpk.go.id>. Monday, April 16, 2018, 7:46:40 AM)

Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi NTT. 2018. *BPK Memberikan Opini WDP untuk LKPD TA 2017 Pemerintah Kota Kupang.* (online)
(<http://kupang.bpk.go.id/?p=7186>) diakses 6 Juli 2018

Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi NTT. 2018. *BPK Memberikan Opini WDP untuk LKPD TA 2017 Pemerintah Kabupaten Belu.* (online)
(<http://kupang.bpk.go.id/?p=7192>) diakses 6 Juli 2018

Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi NTT. 2018. *BPK Memberikan Opini WDP untuk LKPD TA 2017 Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara.* (online)
(<http://kupang.bpk.go.id/?p=7227>) diakses 6 Juli 2018

Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi NTT. *BPK memberikan Opini WDP untuk LKPD TA 2017 Kabupaten Timor Tengah Utara.*(online)
(<http://kupang.bpk.go.id/wp-content/uploads/2016/07/Siaran-Pers-LHP-LKPD-TA-2015-Kab.-TTS.pdf>) diakses 6 Juli 2018

Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi NTT. 2016. *BPK Tidak Memberikan Pendapat untuk LKPD TA 2015 Pemerintah Kabupaten Kupang.* (online)
(<http://kupang.bpk.go.id/wp-content/uploads/2016/07/Siaran-Pers-LHP-LKPD-TA-2015-Kab.-Kupang.pdf>) diakses 6 Juli 2018

Bastian, Indra. 2006. *Sistem Akuntansi Sektor Publik*: Salemba Empat. Jakarta.

Bulu Ina, Vinsensia Kabo. 2013. *Analisis Perbandingan Pendapatan Asli Daerah Pada Kabupaten Dan Kota se-daratan Timor Provinsi Nusa Tenggara Timur.* Kupang :Skripsi Kearsipan Fakultas Ekonomi, Universitas Katolik Widya Mandira Kupang

- Darman Syarif. 2015. *Pengelolaan Keuangan Sektor Publik*. (online) (<http://darmansyarif.blogspot.co.id/2015/02/pengelolaan-keuangan-sektor-publik.html>) diakses tanggal 17 April 2018
- Defenisi-Pengertian. 2015. *Pengertian Keuangan Daerah*. (online) (<http://www.definisi-pengertian.com/2015/07/pengertian-keuangan-daerah.html>) diakses tanggal 15 April 2018
- Halim, Abdul. 2002. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan daerah: Salemba Empat*. Jakarta.
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban, dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan PAD
- Mahmudi. 2016. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*: Yogyakarta :Penerbit ANDI.
- Nordiawan, Dedi. 2006. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta :Salemba Empat.
- Sunarno, Siswanto. 2009. *Hukum Pemerintah Daerah di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika
- Wulandari, Anita. 2001. Kemampuan Keuangan Daerah. *Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik*.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.06/2007 tentang Bagan Akun Standar.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan APBD
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah
- Pramita, Puput Rizky. 2015. *Analisis Rasio Untuk Menilai Keuangan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2009-2013*. Yogyakarta :Skripsi Kearsipan Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Yogyakarta.

Rochmi, Muhamad. 2017. *Kinerja Pemerintah daerah Masih rendah*.(online) (<http://beritagar.id/artikel-pemerintah-daerah-masih-rendah>) diakses 15 April 2018

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014, Tentang Pengelolaan dan Tanggungjawab Negara

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004, Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah